PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

COMMUNITY POLICING AS AN EFFORT TO OVERCOME DISTURBANCES IN PUBLIC SECURITY AND ORDER

Oleh:

Abdhika Salafi Wahid¹, Bakhtiar², Mustaring³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

¹bidkeupoldasulsel@gmail.com, ²bakhtiar@unm.ac.id, ³mustaring@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar, yaitu (a) menginisiasi pembentukan forum komunikasi dan/atau kemitraan polisi dengan masyarakat (FKPM), Siskamling, Hansip, Satpam, Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) dan Bina Masyarakat, dan (b) membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif antara Polri dengan masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. (2) Strategi pemolisian masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu petugas pelaksana tugas pemolisian pada kepolisian, faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat dalam program pemolisian.

KATA KUNCI: Pemolisian, Masyarakat, Polri

ABSTRACT: *This study aims to determine: (1) The strategy of community policing in tackling disturbances to security and public order in Makassar City. (2) Factors influencing the implementation of the community policing strategy in dealing with disturbances to security and public order in Makassar City. The results of the study show: (1) Community policing strategies in tackling disturbances to security and public order in Makassar City, namely (a) initiating the establishment of Fotum Kemitraaan Kepolisian Makassar (FKPM), Siskamling, Hansip, Security Guards, and Community Development, and (b) building intensive cooperation and communication between the Police and the public through these institutions. (2) Community policing strategy is influenced by supporting and inhibiting factors. Supporting factors are policing officers at the police, inhibiting factors are policing officers at community participation and community trust to the police program.*

KEYWORDS: *Policing, community, Polri*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mewujudkan stabilitas sosial dalam masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam upaya membangun dan membina terwujudnya ketertiban umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberi tugas dan wewenang untuk menciptakan situasi aman dan damai. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Secara spesifik, tugas dan peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pokoknya, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.¹ Tugas dan peran yang dimiliki oleh Polri tersebut memiliki untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.³ Situasi Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenteram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat, melindungi, menertibkan masyarakat.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas manusia juga mengalami peningkatan, termasuk dengan arus informasi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat dan tidak terbandung. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas dan kuantitas tindak kejahatan juga mengalami perkembangan. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan Polri, belum bisa menjadi sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di tengah-tengah masyarakat.⁵ Fenomena angka kriminalitas tidak dapat dikurangi hanya dengan sekedar menambah jumlah personel Polri dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan rasa aman pada

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Yoslan K. Koni, “Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo”, *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 41, Nomor 1, April 2019, Hlm. 53.

⁴ Diana Verjenia, “Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Dau”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Malang, hlm. 5.

⁵ Tora Egen Sitompu, Lintje Anna Marpaung, dan Erlina B, “Penerapan Peraturan Pemolisian Masyarakat Di Provinsi Lampung”, *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019*, hlm. 2.

akhirnya membuat Polri harus mengubah konsep pemolisiannya dari yang konvensional menjadi modern.

Banyak jenis kejahatan serta dimensi yang sebelumnya tidak ada, sehingga membuat metode, teknik dan cara melakukan kejahatan semakin hebat dan sulit untuk dipecahkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep pemolisian yang lazim digunakan saat ini butuh untuk dievaluasi sehingga kinerja Polri dalam menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien daripada sebelumnya.

Dari segi jumlah, personil kepolisian saat ini mengalami ketimpangan jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat.⁶ Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen membuat jenis-jenis kejahatan menjadi sangat bervariasi. Oleh karena itu, tingkat kejahatan yang semakin tinggi dan bervariasi memerlukan penanganan yang serius dan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional serta jumlah personil yang memadai. Di samping itu, peran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sangat dibutuhkan oleh Polri untuk mewujudkan cita-cita negara dalam UUD 1945.

Sebagai kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar menjadi wilayah dengan potensi kriminalitas yang dinilai cukup tinggi. Mengingat, kota Makassar menjadi tempat bertemunya orang-orang dengan berbagai latar belakang suku, ras, agama dan golongan. Yang dapat menimbulkan gesekan konflik dalam kehidupan sosialnya. Sebagai ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar juga tidak pernah lepas dari keberadaan pendatang baru. Serta

tingginya angka ketimpangan sosial ekonomi, menjadikan faktor timbulnya konflik yang berujung pada tindakan kejahatan baik level antara individu maupun level antar kelompok.

Menurut laporan yang dilansir oleh Katadata.co.id, pada tahun 2019, angka kriminalitas di Sulawesi Selatan mencapai 21.4 ribu laporan. Kota Makassar berada di posisi teratas sebagai kota yang rawan akan kriminalitas.⁷ Di tahun 2021, laporan kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menerangkan, terjadi peningkatan kejahatan dan terbanyak terjadi di Kota Makassar. Kejahatan yang terjadi didominasi kejahatan konvensional, seperti penganiayaan, pencurian atau penjabretan, penipuan, penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Serta berbagai kejahatan dan pelanggaran lainnya.

Selama tahun 2021 juga, Kepolisian Resort Kota Makassar mencatat telah terjadi 34 kasus tawuran antar kelompok.⁹ Sepanjang tahun 2022, telah terjadi empat hingga tujuh kasus tawuran antar kelompok. Maraknya perilaku jahat dan pelanggaran di sejumlah titik di Kota Makassar telah dikeluhkan oleh warga setempat sebab dirasa kian meresahkan masyarakat. Tak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korbannya, bahkan hingga mengakibatkan luka dan kematian. Kejahatan jalanan seperti aksi balapan liar, aksi begal, kebut-kebutan di jalanan, aksi tawuran, bahkan aksi penembakan di jalanan. Hal ini seringkali menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

⁶ Siti Marwiyah, "Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan, Jurnal Yustisia", Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2014, Hlm. 64.

⁷ <https://www.99.co/blog/indonesia/provinsi-dengan-kriminalitas-tertinggi/>, diakses pada 5 Februari 2022.

⁸ <https://makassar.sindonews.com/read/477772/710/angka-kejahatan-di-sulsel-meningkat-selama-2021-1625749630>, diakses pada 5 Februari 2022.

⁹ <https://kataberita.co/begini-cara-dispora-tekan-angka-kasus-tawuran-di-makassar/> diakses pada 10 Juli 2022.

Tingginya angka kriminalitas di Kota Makassar, semakin menekankan pentingnya kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi di dalam mengidentifikasi dan mengatasi kejahatan setempat serta masalah ketidaktertiban. Inti dari tujuan program pemolisian masyarakat adalah terbangunnya sinergitas dan kerjasama antara Polri dan dengan seluruh elemen masyarakat untuk pendeteksian dini adanya potensi tindak kejahatan di lingkungan masyarakat. Namun, seringkali kepolisian cenderung lambat mengatasi potensi kejahatan yang terjadi. Bahkan polisi baru mengetahui saat peristiwa sedang terjadi atau telah terjadi. Kemudian, diketahui juga bahwa pemolisian masyarakat merupakan program yang bersifat nasional namun model pelaksanaannya di berbagai daerah bisa saja berbeda. Untuk itu, menjadi penting memahami bagaimana model pemolisian masyarakat yang dilaksanakan di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologi. Fokus yang menjadi sasaran kajian dalam penelitian ini adalah: (1) Strategi pemolisian masyarakat; dan (2) Faktor yang memengaruhi strategi pemolisian masyarakat. Data primer penelitian ini bersumber pada hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan dengan terjun langsung ke Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan FKPM. Data penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara Peneliti dengan Subjek Penelitian. Data sekunder penelitian ini bersumber pada kajian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti melalui dokumen tugas dari FKPM. Kajian terhadap

Keputusan Polri tentang Pemolisian Masyarakat dan Jurnal yang berkaitan dengan Pemolisian Masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, pencermatan data dan penambahan waktu penelitian untuk mengkaji lebih dalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar bertempat di Kota Makassar tepatnya berada di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 9. Luas wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar meliputi seluruh wilayah kota Makassar yaitu 175,77 km².

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. Secara geografis terletak antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah Selatan Kabupaten Gowa, dan sebelah Barat Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara, selain itu juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang di dalamnya

mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang semuanya bermuara ke dalam Kota. Kota Makassar merupakan hamparan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya pasang.

Secara administrasi, Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan, di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai instansi penegakan hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), berdasakan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan keputusan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 54/X/2002, Polrestabes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pemberian arahan dan penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh kapolda.
- 2) Pemantauan dan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional Polres meliputi

fungsi intelijen keamanan, recerce criminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.

- 3) Pemberian dukungan (back up) operasional kepada polres, baik melalui kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda).
- 4) Penyelenggaraan operasional khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu.
- 5) Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sesuai lingkup kewenangannya.
- 6) Penjabaran kebijakan dan penindak lanjutan perintah atas atensi Kapolda.

Adapun visi dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yaitu terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kambtibmas) yang prima dan tegaknya hukum serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif diwilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

Berdasarkan dari visi yang dicita-citakan maka dari itu diuraikan dalam misi dari Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan segala bidang tugas kepolisian.
- 2) Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesioanalisme melalui program pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat, dan berlanjut secara konsisten.
- 3) Mencegah dan menanggulangi semua bentuk kejahatan terutama perjuadian, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan jalanan (*street crime*).
- 4) Meniadakan rasa takut dan khawatir (*fear of crime*) bagi semua anggota masyarakat yang berada dalam

wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

- 5) Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum dalam semua aspek perilaku baik yang bersifat internal (bagi seluruh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar beserta keluarganya) maupun eksternal (bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Makassar); dan
- 6) Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Kepolisian Kota Besar Makassar memiliki 5 fungsi sebagai teknis operasional yaitu satuan lalu lintas (Satlabtas), satuan intelijen dan pengamanan (satintelkam), satuan reserse kriminal (satreskrim), pembinaan dan kemitraan (binamitra), dan satuan samapta (satsamapta). Adapun tugas dari masing-masing teknis operasional adalah:

- 1) Satuan Lalu Lintas (Satlantast) bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah Polrestabes.
- 2) Satuan Intelijen dan pengamanan (Seintelkam) bertugas melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.
- 3) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pembinaan dan Kemitraan (Binamitra) bertugas untuk pembinaan.

Secara garis besar fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian Resor

Kota Besar (Polrestabes) Makassar selama ini berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga Polrestabes Makassar melakukan dua cara yaitu untuk model penyelesaiannya sendiri itu ada dua garis besar ada yang sifatnya non litigasi dan litigasi kalau yang sifatnya non litigasi di luar konteks hukum kita melakukan secara kekeluargaan atau mediasi dan yang sifatnya litigasi ada beberapa kriteria kasus yang diproses dengan melalui jalur hukum.

Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Makassar

Membangun Komunikasi yang Intensif antar Polri dan FKPM sebagai Mitra Kepolisian

Dalam pelaksanaan sebuah program di sebuah organisasi tertentu, termaksud juga Polri, sangat membutuhkan komunikasi untuk jalannya program tersebut. Hal ini juga dalam program Polmas. Demikianlah yang peneliti temukan dalam wawancara. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Iptu Abdul Syukur, sebagai Kanit Polmas, menyatakan bahwa hubungan yang dilakukan oleh masyarakat dengan Polri yang telah dilakukan selama ini. Karena selama ini, telah dilakukan dengan baik. Hasil wawancara dengan Iptu Syukur, Kanit Polmas, (wawancara, Senin, 26 September 2022 di Kantor Polrestabes):

Sebenarnya kita selalu galang dengan secara humanis karena salah satu untuk meredam situasi, hal-hal yang tidak diinginkan oleh komunitas itu maka kita bangun suatu hubungan emosional dengan komunitas itu agar aturan-aturan

yang biasanya ee akan tertata atau teratur toh tidak melakukan.¹⁰

Iptu Syukur menekankan dengan komunikasi sebagai kunci dari berjalannya organisasi, termaksud dalam mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah tindak pidana. Hasil wawancara dengan Ipto Syukur, Kanit Polmas, (wawancara, Senin, 26 September 2022 di Kantor Polrestabes): “Dengan adanya komunikasi, kami dapat mengetahui daerah-daerah yang memugkin terjadinya sebuah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat mulai dari benih.”¹¹

Hal demikian juga diterangkan oleh M. H Yahya Dg Nai sebagai Wakil Ketua FKPM Kelurahan Tidung. Yahya menekankan bahwa, meskipun ada beberapa hal yang bisa ditangani dengan kekeluargaan oleh FKPM, kasus yang berat sanksi pidananya akan di Informasikan segera ke Kepolisian.

Kalau kita sebagai FKPM tidak bisa bahwa ada kejadian itu kami tidak bisa menangani langsung ke TKP semisal beberapa kasus seperti pembunuh, tawuran yang terdiri atas 10 orang lebih, itukan kita tidak punya hak untuk disitu, kitakan hanya Mitra, membantu, jadi kalau misalkan pihak kepolisian sudah ada di tempat baru kita bisa masuk. Jadi kita memberikan informasi bahwa di daerah ini, jam segini, titiknya dititik ini. Itu yang kita sampaikan.¹²

Dokumentasi terhadap tugas FKPM Kelurahan Tidung

Dalam studi dokumentasi yang dilakukan terhadap tugas dari FKPM khususnya pada FKPM di kelurahan Tidung, tampak jelas bahwa Pengumpulan data terkait masalah-masalah yang ada di masyarakat

merupakan hal yang paling diprioritaskan. Dengan ini akan mempermudah Kepolisian dalam mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab gangguan ketertiban masyarakat.

Demikian juga dinyatakan oleh Dani anggota FKPM Kecamatan Tallo, bahwa komunikasi yang intens merupakan kunci utama berjalannya FKPM.

Bagaimana pun FKPM merupakan lembaga mitra Polri yang tidak bisa berjalan sendiri. Kami bisa mengerjakan tujuan dari FKPM yakni membantu terciptanya keamanan dalam masyarakat hanya apabila Polri ikut aktif, dan itu semua di mulai dengan komunikasi yang baik.¹³

Dari seluruh data yang telah dipaparkan diatas memberikan peneliti menrik kesimpulan bahwa komunikasi yang intens antar lembaga FKPM dan Polri merupakan media yang digunakan oleh keduanya untuk mengefektifkan program Pemolisian. Program Pemolisian tidak akan berjalan dengan baik apabila komunikasi antar FKPM dan Polri tidak berjalan dengan baik.

Pengawasan dan Komunikasi yang Intensif terhadap anggota Mitra Polisi oleh Polrestabes kota Makassar

Selain menjalankan komunikasi pihak Polrestabes, terkhusus Bimnas, melakukan pengawasan terhadap FKPM. Ini dilakukan agar FKPM berjalan sebagaimana mestinya. Wakil Ketua FKPM kecamatan Tidung menyatakan bahwa “perlu dilaksanakan pengawasan agar FKPM berjalan dengan rel yang telah ditentukan”¹⁴.

Kalau kita sebagai FKPM tidak bisa bahwa ada kejadian itu kami tidak

¹⁰ Wawancara pada 26 September 2022

¹¹ Wawancara pada 26 September 2022

¹² Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2022

¹³ Wawancara 10 Oktober 2022

¹⁴ Wawancara 7 Oktober 2022

bisa menangani langsung ke TKP semisal beberapa kasus seperti pembunuhan, tawuran yang terdiri atas 10 orang lebih, itukan kita tidak punya hak untuk disitu, kitakan hanya Mitra, membantu, jadi kalau misalkan pihak kepolisian sudah ada di tempat baru kita bisa masuk. Jadi kita memberikan informasi bahwa di daerah ini, jam segini, titiknya dititik ini. ini perlu jangan sampai FKMP melakukan suatu hal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.¹⁵

Selain itu juga ini dilakukan untuk mengefektifkan kerja FKPM. FKPM tidak bisa melakukan langkah yang terlampau banyak, melebihi kekuasaan yang diberikan kepadanya. Ini juga dinyatakan oleh Risman anggota FKPM Kecamatan Tallo (Wawancara pada 7 Oktober 2022 di Polda Sulsel), bahwa: Kita menjaga komunikasi dengan pihak organik, ini untuk melancarkan semua aktifitas dari FKPM. Kami juga butuh bimbingan dan pengarahan dari pihak organik. Lagi kami tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah secara langsung.¹⁶

Strategi ini sangat baik, untuk melakukan pencegahan potensi kejahatan di masyarakat. Dengan adanya FKPM ini masyarakat mendapatkan edukasi, bukan hanya dari pihak dari kepolisian namun juga dari masyarakat sendiri. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh wakil ketua FKPM Kecamatan Tidung.

Tapi alhamdulillah kita di kelurahan Tidung ini kemajuannya ini, sejak berdiri FKPM ini teman-teman yang tadinya, maaf ini yah yang tadinya menggunakan hal yang tidak baik, tapi alhamdulillah dengan ada masuknya FKPM ini lambat laun sudah tidak ada kebiasaan itu. Justru disini kita membina dari dalam.¹⁷

Strategi ini lebih baik, sebab yang tahu betul bagaimana karakter dari

masyarakat adalah anggota masyarakat itu sendiri. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh wakil ketua FKPM Kecamatan Tallo. Kita membina dari dalam itu peran sertanya RT/RW. Kita tidak bisa melakukan pemantauan kalau tidak ada RT/RW karena yang mengetahui itu sifat dan kelakuan anak-anak remaja itu kan RT/RW. Kalau RT/RW sinergi dengan kita pasti kan aman.¹⁸

Hal demikian menandakan bahwa FKPM dan Polri harus bersamaan melakukan kinerja, sebab ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh FKPM sendiri, perlu didampingi oleh Polri. Ini juga akan memiliki dampak yang baik dalam mendeteksi potensi ancaman keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Pemolisian di Kota Makassar

Program kepolisian tidak selamanya berjalan efektif. Walaupun apa yang telah dicita-citakan (das sollen), namun kadang kala pelaksanaan (das sein) tidak sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan. Itulah juga yang terjadi dalam Pemolisian Masyarakat.

Keefektifan Polmas dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut adalah pelaksana tugas pemolisian pada kepolisian, budget yang menopang pelaksanaan program pemolisian, partisipasi masyarakat dalam program pemolisian, partisipasi masyarakat dalam program pemolisian, sumberdaya masyarakat dalam melaksanakan program pemolisian.

Faktor Pendukung

¹⁵ Wawancara pada 7 oktober 2022.

¹⁶ Wawancara pada 12 Oktober 2022.

¹⁷ Wawancara pada 7 Oktober 2022.

¹⁸ Wawancara pada 12 Oktober 2022.

Pelaksana tugas pemolisian pada kepolisian

Pelaksana dalam sebuah program merupakan salah satu faktor penting bagi terlaksananya sebuah program. Sebagaimanapun baiknya sebuah program direncanakan jika dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kapabilitas tidak mencukupi maka program tidak akan berjalan sebagaimana yang dicita-citakan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Iptu Abdul Syukur, beliau menjelaskan bahwa: Untuk sementara kalau untuk pelaksanaan pemolisian khususnya Babin, Babin, di lapangan masih fleksibel saja, belum ada menjadi suatu kendala di lapangan karena masyarakat sudah maksimal apa artinya lebih mempercayai BABINMAS di lapangan daripada fungsi-fungsi lain, dikarenakan hubungan kedekatan emosionalnya sudah bagus sekali.¹⁹

Faktor Penghambat

Partisipasi masyarakat dalam program Pemolisian.

Program Polmas merupakan program yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Olehnya masyarakat harus terbuka dan legoyo tentang komunikasi yang dilakukan antar dirinya dengan Polri. Sebab program Polmas sebagai program yang membantu polisi dalam melakukan pencegahan dan menangan kemungkinan gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat sejak akar rumput tidak bisa diidentifikasi jika tidak ada bantuan dari masyarakat.

Bahwa begini, polmas itu diatur dalam Perkab 01/2001 tentang kepolisian masyarakat bahwa bagaimana memberdayakan apa itu organisasi-

organisasi kayak FKPM itu untuk membantu kepolisian dalam menangani suatu persoalan tidak terlepas dari pada tugas kepolisian disitu. Eee Diatur dalam perkab 08/2021 tentang restorasi justice, tahu toh, perkab 08/2021, perpol polmas 01/2021. Perpol 08/2021 tentang restorasi justice. Bahwa diberikan kewenangan untuk semua fungsi, bukan Cuma BABIM saja tapi yang lain juga, tapi sudah diatur itu bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan di bawah itu, sudah ada warning di bawah itu jadi tidak serta merta melalu jalur hukum atau pendekatan hukum disitu karena bagaimana kepolisian masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kewilayahan.²⁰

Pemolisian masyarakat suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian untuk melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pemolisian masyarakat atau *community policing* telah diatur dalam program kepolisian yang telah diterapkan oleh Polri di seluruh provinsi di Indonesia. Kepolisian Indonesia telah menetapkan pemolisian masyarakat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam pasal 1 huruf 3, menyebutkan bahwa: Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.²¹

Dalam pelaksanaan dari Pemolisian Masyarakat memberikan hubungan yang partisipasif antar warga negara dan kepolisian dalam memberantas sebuah kasus kejahatan, atau mencegah. Ini jelas dapat kita lihat sebab ini merupakan salah satu dari pilar

¹⁹ Wawancara pada 26 september 2022

²⁰ Wawancara pada 26 september 2022

²¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

dibuatnya program pemolisian masyarakat ini.

Pemolisian masyarakat merupakan upaya Polri yang bekerjasama dengan masyarakat untuk menyikapi persoalan keamanan dalam masyarakat. Pelaksanaannya ini sangat menekankan pada partisipasi warga negara terhadap upaya menciptakan kondisi keamanan di tengah masyarakat. Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.”

Dalam rumusan masalah ini akan berfokus pada strategi polmas. Strategi polmas merupakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian agar masyarakat ikutserta dalam melakukan upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan keamanan. Dalam Peraturan kepolisian tentang Pemolisian Masyarakat dijelaskan bahwa: Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya”.²²

Strategi Pemolisian Masyarakat dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Makassar

Menginisiasi pembentukan forum kemitraan polisi dengan masyarakat (FKPM)

²² ibid

²³ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban

Kepolisian adalah institusi yang diamanatkan oleh UUD NRI dalam pasal 30 ayat (4)²³ menjaga di seluruh wilayah hukum di Indonesia, untuk di kota Makassar yakni Polrestabes kota Makassar. Namun Polrestabes kota Makassar tidak bisa berjalan sendiri, tanpa bantuan masyarakat, dalam memberantas potensi gangguan keamanan di wilayah hukum kota Makassar. Hal ini penting sebab kekuatan polisi saja tidak akan mampu mengatasi gangguan keamanan yang ada di masyarakat. *The Community Policing Consortium* pada tahun 1994, menekankan bahwa *police alone cannot control crime and disorder and promote residents quality of life* (polisi saja tidak dapat mengendalikan kejahatan dan kekacauan dan meningkatkan kualitas hidup warga.).

Polrestabes Kota Makassar membutuhkan partisipasi dari masyarakat sipil yang terorganisir dalam lembaga yang dapat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepolisian untuk memberantas potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Makassar. Prinsip partisipatif yang dimaksud yakni: Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri.²⁴

Sebab memerlukan partisipasi masyarakat itu sehingga kepolisian membentuk FKPM sebagaimana dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

²⁴ Ibid.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Polri menyadari bahwa strategi Pemolisian masyarakat sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Dalam dasar filosofis pada konsideran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat berbunyi: bahwa penerapan pemolisian masyarakat sangat penting dalam membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara optimal;

Membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif antara Polri dengan antar Polri dan FKPM sebagai Mitra Kepolisian

Strategi Polmas di wilayah hukum Makassar oleh Polrestabes dan masyarakat kota masyarakat yakni membangun komunikasi yang harmonis antar masyarakat, Polmas dan Polri agar kegiatan ini terkontrol terkoordinir secara baik. Ini dilakukan di dalam upaya untuk menciptakan kerja yang baik antara masyarakat, polri dan FKPM. Komunikasi ini dilakukan agar adanya keharmonisan dalam menjalankan program-program polmas.

Komunikasi antara Polri dan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah landasan utama terjadinya kemitraan yang baik antara keduanya. Ini berkesesuaian dengan prinsip pelaksanaan Polmas diuraikan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat, yang salah satunya adalah komunikasi yang intensif.²⁵ Komunikasi intensif ini menjadi dasar agar terjadi kolaborasi

yang baik antara pihak FKPM dan Polrestabes kota Makassar.

Sekalipun komunikasi merupakan dasar berjalan semua prinsip Polmas yang lain yakni kemitraan, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, hubungan personal, proaktif dan orientasi pada pemecahan masalah. Tidak mungkin berjalan hubungan personal jika tidak ada komunikasi yang baik. Begitu pula pemecahan masalah dalam wilayah hukum masyarakat yang bersumber dari masyarakat, hanya bisa dilakukan apabila FKPM mengeluarkan seluruh informasi kepada kepolisian.

Komunikasi yang intensif ini bukan didasarkan pada kedudukan “Pembina” dan “orang yang dibina”, namun didasarkan pada persamaan kedudukan, atau lebih tepatnya mitra. Sehingga jarak antar Kepolisian dan masyarakat itu tidak lagi lebar. Komunikasi yang setara akan memberikan perasaan yang lebih lega, sehingga informasi itu lebih mengenai gangguan keamanan tidak lagi tertutupi atau jauh dari pihak kepolisian. Ini bersesuaian dengan filosofi dibentuknya Polmas, yakni pelibatan masyarakat. Model ini pada hakikatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah. Aroma kekuasaan dan kekuatan POLRI di atas masyarakat, dirasa masih sangat kental dan menyebabkan adanya jarak antara warga dan polisi.

Sekalipun Polmas menempatkan Masyarakat dan Kepolisian sebagai posisi mitra. Namun Kepolisian dalam hal ini Bimnas perlu melakukan pengawasan dan pembimbingan pada FKPM. Polrestabes kota Makassar, dengan Iptu Abdul Syukur sebagai Ketua Bimnas, tetap melakukan pengawasan untuk

²⁵ Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung

maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.

mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan FKPM.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Strategi Pemolisian di Kota Makassar

Faktor Pendukung

Pelaksana tugas pemolisian pada kepolisian

Polmas sebagai sebuah program yang membangun komunikasi dan kerjasama demi melakukan pemberantasan gangguan keamanan dalam masyarakat memiliki petugas, sebagaimana program pada umumnya. Berdasarkan pada pasal 1 huruf menyatakan bahwa Petugas Polmas adalah Polri dengan pangkat Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat.

Pasal tersebut menekankan secara tegas bahwa pihak yang memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan program pemasyarakatan tetaplah Polri. Sehingga konsekuensinya adalah Polrilah yang memiliki pertanggungjawaban lebih dari berjalannya program ini.

FKPM di dalam melaksanakan tugas harus mendapatkan dukungan dan bimbingan dari pihak Kepolisian. Dukungan ini menjadi penting untuk menanamkan rasa kepercayaan pada masyarakat tentang hubungan baik antara kepolisian dengan masyarakat dan tujuan yang mereka capai. Dukungan dan keaktifan anggota sangatlah penting mengingat langkah penegakan hukum tetap berada pada Polri. Keadaan ini membuat hanya Polri yang dapat melakukan tindakan penegakan hukum,

bukan FKPM. Sehingga seprogresif apapun FKPM jika kepolisian tidak lebih progresif mana cita-cita yang dikehendaki untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat tidak akan bisa tercapai.

Polri menghadapi keadaan yang kurangnya kepercayaan publik, utamanya sebab ada beberapa “oknum” kepolisian yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Keadaan itu, digeneralisasi oleh beberapa pihak yang pada akibatnya menimbulkan kurang percayanya beberapa masyarakat kepada kinerja kepolisian.

Sekalipun dari pada itu, Kepolisian tetap melaksanakan tugasnya untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berbagai strategi, salah satu Pemolisian Masyarakat. Partisipasi kepolisian di tengah stereotype publik seperti demikian merupakan alasan mengapa Polmas masih berjalan.

Faktor Penghambat

Partisipasi masyarakat dan Kepercayaan masyarakat dalam program Pemolisian

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang sangat esensial dalam program pemolisian masyarakat. Sebagaimana nawaitu awal program polmas untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam mencegah dan menangani berbagai macam gangguan keamanan dalam masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah tidak mungkin polmas berjalan dengan baik.

Hasil wawancara yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian telah tampak jelas bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kesuksesan dari kegiatan kegiatan pembelian masyarakat. Partisipasi masyarakat masih menjadi sebuah hal

yang harus didorong terus-menerus demi kesuksesan dari kegiatan kegiatan pembersihan masyarakat. Sebab di lapangan secara tersirat dikatakan oleh wakil ketua FKMP kecamatan Toddopuli bahwa sebagian FKMP yang ada di kota Makassar belum betul-betul melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara hal ini disebabkan sebab perspektif “bampol” atau bantuan polisi yang negatif di masyarakat. FKMP diartikan oleh sebagian masyarakat sebagai banpol, dan dalam keadaan seperti itu membuat partisipasi masyarakat sangat minim. Padahal FKPM dibentuk agar masyarakat mempunyai perpanjangan tangan atau sebaliknya kepolisian mempunyai perpanjangan tangan dalam mengambil sebuah informasi di dalam masyarakat.

Dilain sisi FKPM harusnya digunakan dan mendapatkan kepercayaan sebagai corong informasi dan mitra kepolisian untuk memberantas kejahatan, FKPM jika tidak dikontrol memungkinkan menjelma menjadi sebuah organisasi yang sangat liar jika tidak dikontrol. Dalam keadaan ini, FKMP yang diharapkan menjadi mitra masyarakat yang menjadi alat kepolisian untuk lebih dekat dengan masyarakat malah menjauhkan kepolisian dengan masyarakat. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus batalion 120. Dalam kejadian tersebut didapatkan 164 (seratus enam puluh empat) buah anak pana, empat buah parang, satu buah Senjata Rakitan Jenis Papporo, tiga buah Ketapel.dan 38 Botol Minumam Keras yang kosong serta 20 unit sepeda motor.²⁶

Kejadian itu memberikan stereotype kepada publik, bahwa pada preman diorganisir oleh pemerintah, dan seluruh perbuatan yang dibuatnya, digaranti oleh pihak Kepolisian. Dengan

keadaan itu maka diperlukan adanya pengawasan dari kepolisian terhadap pihak FKPM.

Harusnya Polmas dan masyarakat mempunyai hubungan yang baik dan tidak saling mencurigai. Jangan adanya itu, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi atau mengakses bantuan tertentu dari kepolisian melalui FKPM. Sebaliknya FKPM dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait dengan keadaan masyarakat di wilayah hukum yang ditempati. Dengan massif dan intensifnya pemolisian masyarakat, gangguan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat minimal dapat berkurang seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu menjaga kemananan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

PENUTUP

Strategi pemolisian masyarakat yang dilakukan oleh Polrestabes dalam upaya menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar, yaitu: (a) Strategi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar, yakni (a) menginisiasi pembentukan forum komunikasi dan/atau kemitraan polisi dengan masyarakat (FKPM), Siskamling, Hansip, Satpam, Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) dan Bina Masyarakat, dan (b) membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif antara Polri dengan masyarakat melalui lembaga-lembaga Polmas tersebut.

Strategi pemolisian masyarakat di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung, yakni petugas

²⁶ Matasulsel. <https://matasulsel.com/di-resmikan-kepolres-sekretariat-batalion-120-jadi-tempat-pesta->

[miras-dan-penyimpanan-sajam/](https://matasulsel.com/di-resmikan-kepolres-sekretariat-batalion-120-jadi-tempat-pesta-). Dikutip pada tanggal 16/12/22.

pelaksana tugas pemolisian pada kepolisian, dan faktor penghambat yakni Partisipasi masyarakat dan Kepercayaan masyarakat dalam program Pemolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Diana Verjenia, “Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Dau”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Malang.

<https://kataberita.co/begini-cara-disporatekan-angka-kasus-tawuran-dimakassar/> diakses pada 10 Juli 2022.

<https://makassar.sindonews.com/read/477772/710/angka-kejahatan-di-sulsel-meningkat-selama-2021-1625749630>, diakses pada 5 Februari 2022.

<https://www.99.co/blog/indonesia/provinsi-dengan-kriminalitas-tertinggi/>, diakses pada 5 Februari 2022.

Matasulsel. <https://matasulsel.com/diresmikan-kapolres-sekretariat-batalion-120-jadi-tempat-pestamiras-dan-penyimpanan-sajam/>. Dikutip pada tanggal 16/12/22.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

Siti Marwiyah, “Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan, Jurnal Yustisia”, Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2014.

Tora Egen Sitompu, Lintje Anna Marpaung, dan Erlina B, “Penerapan Peraturan Pemolisian Masyarakat Di Provinsi Lampung”, Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Yoslan K. Koni, “Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo”, Jurnal Kertha Patrika, Volume 41, Nomor 1, April 2019.